

SINOPSIS

Salah satu agenda pembangunan nasional adalah menciptakan tata pemerintahan yang bersih, dan berwibawa. Agenda tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, antara lain: keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih mendalam tentang penerapan prinsip-prinsip “*Good Governance*” terhadap pemberian pelayanan publik di Kantor Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Subyek penelitian adalah seluruh aparat pemerintah Kecamatan Kalikajar dan warga masyarakat Kalikajar yang sedang mendapat pelayanan publik. Pengambilan sampel untuk warga masyarakat menggunakan teknik *convinience sampling*.

Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah (1) Transparansi layanan publik dalam kepengurusan KK dan KTP pada Kantor Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo sudah baik (skor rata-rata=3,48), (2) Layanan publik khususnya dalam kepengurusan KK dan KTP ditinjau dari reponsibilitas terhadap kebutuhan masyarakat mempunyai rata-rata penilaian tinggi dari masyarakat menunjukkan aparat pemerintahan yang ada telah cukup responsive dan mengenal kebutuhan masyarakatnya (skor rata-rata=3,55), (3) Dilihat dari aspek akuntabilitas yaitu dari tolok ukur proses dan hasil pelayanan masih belum optimal dan belum seluruhnya memenuhi harapan masyarakat. Nilai rata-rata aspek akuntabilitas adalah sedang (skor rata-rata=3,28), (4) Nilai partisipasi layanan publik khususnya dalam kepengurusan KK dan KTP adalah cukup (skor rata-rata=2,75).

Untuk mewujudkan *good governance* dalam pelayanan publik di Kecamatan Kalikajar masih perlu dilakukan upaya pembenahan seperti: (1) sosialisasi pada masyarakat tidak hanya pada prosedur administratif tetapi juga berkaitan dengan kebijakan program, tujuan, pelaksanaan kegiatan diharapkan akan dapat meningkatkan transparansi pelayanan publik dan secara tidak langsung dapat meningkatkan akuntabilitas program kegiatan, (2) Masyarakat lebih diikutsertakan dalam perencanaan kebijakan pelayanan publik. Sehingga masyarakat akan lebih merasa memiliki dan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bersama-sama berperan serta dalam merealisasikan program dan tujuan bersama.